



MASS MEDIA

FAJAR TRIBUN SEPUTAR INDONESIA BISNIS INDONESIA
 KOMPAS REPUBLIKA UJUNG Pandang EKSPRES KORAN TEMPO

TANGGAL :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

BULAN :

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
	✓										

TAHUN

2012

HAL

B.11

Belum Ada Calon Anggota BPK yang Menonjol

Pencalonan kembali secara konstitusi dibolehkan.

JAKARTA — Hingga hari ketiga uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyeleksi 22 dari total 34 calon. Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Aziz mengatakan belum bisa menyebutkan nama calon yang menonjol. Meski demikian, secara pribadi ia mengakui ada sejumlah calon kuat yang menarik perhatian.

Kemarin, Komisi Keuangan menyeleksi delapan calon, salah satunya anggota Pengawas Keuangan Daerah BPK, Sapto Amal Damandari, yang kembali mencalonkan diri. Masa jabatan Sapto akan habis tahun ini.

Sebelumnya, tercatat ada 35 nama yang akan menja-

lani uji kelayakan dan kepatutan. "Ada satu orang yang akhirnya mengundurkan diri," ucap Harry.

Soal pencalonan kembali, Sapto berdalih karena secara konstitusi dibolehkan. "Saya manut saja," ucapnya ketika ditanya apakah akan kembali mengincar jabatan sebagai anggota pengawas keuangan daerah.

Ia berkeinginan mengawal kembali penataan pelaporan keuangan daerah yang baru saja selesai disusun. "Saya ingin mengawal apa yang sudah kami susun sebelumnya."

Bekas Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Tubagus Haryono, yang seharusnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan, akhirnya harus mundur karena kendala administrasi. "Ia mundur karena belum genap dua tahun melepas jabatan Kepala BPH Migas," kata Harry.

Adapun calon anggota

BPK, Emita W. Astami, menilai audit forensik BPK atas kasus dana talangan Bank Century kurang mendalam. "Belum ada auditor BPK yang menguasai audit forensik secara mendalam," katanya.

Ia mengatakan masih terdapat beberapa celah dalam audit BPK tersebut. "BPK masih kekurangan pakar dalam bidang teknologi informasi maupun transaksi perbankan," katanya.

Menurut Emita, audit forensik BPK akurat tapi belum cukup mengungkap skandal Bank Century. "Padahal bisa saja ada transaksi yang dihapus dalam rekaman data transaksi perbankan yang dimaksud."

Selain itu, ia menyoroti tumpang-tindihnya peran BPK dan BPKP. Seharusnya BPKP mengawal penyusunan anggaran Kementerian dan lembaga, sedangkan BPK harus memberikan opini secara wajar terhadap laporan keuangan institusi. ● SURKHAN